

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

VIVI ANUGRAH ILAHI

2019/19043061

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

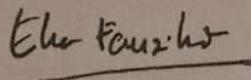
PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2020-2022)

Nama : Vivi Anugrah Ilahi
TM/NIM : 2019/19043061
Departemen : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Maret 2024

Disetujui oleh :

Ketua Departemen Akuntansi



Dr. Eka Fauzihardani, SE., M.Si, Ak
NIP. 19710522 200003 2 001

Pembimbing



Charoline Cheisvivanny, SE, M. Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS SKRIPSI

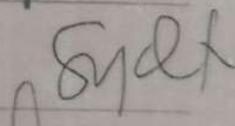
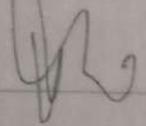
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2020-2022)

Nama : Vivi Anugrah Ilahi
TM/NIM : 2019/19043061
Departemen : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Maret 2024

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Charoline Cheisviyanny, SE, M. Ak	
2.	Anggota	Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D	
3.	Anggota	Jefriyanto, SE, M.Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vivi Anugrah Ilahi
NIM/Tahun Masuk : 19032061/2019
Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh/ 10 Maret 2000
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl. Kalimantan No. 25A Kel. Padangtengah Balainanduo,
Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh
No. Handphone : 082387442637
Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris pada
Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2020-2022)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di UNP atau di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama penarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Dosen pembimbing, Tim penguji dan Ketua Departemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Maret 2024



Yang Menyatakan,

Vivi Anugrah Ilahi

NIM. 19043061

ABSTRAK

Iahi, Vivi Anugrah. (19043061/2019). “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)”. Skripsi. Padang; Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Pembimbing : Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Indikator *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik dewan komisaris (ukuran, dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat), karakteristik komite audit (ukuran dan frekuensi rapat), dan struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik). Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022, dengan metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh total sampel keseluruhannya sebanyak 57 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang dibantu dengan *software* SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Kata Kunci : *Corporate Governance*, Dewan Komisaris, Komite Audit, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Struktur Kepemilikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT., atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)”** dengan lancar. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan program S1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Di samping itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak yang sangat berperan dalam proses penyusunan skripsi ini, antara lain yaitu:

1. Teristimewa kepada Ayah Bakhtiar dan Ibu Susanti yang telah memberikan dukungan, do'a yang tulus, dan semangat serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Kepada Kakak Vanessa Utami, SH serta Adik-Adik Ivo Tri Septiana dan Rahmat Rizqullah yang terus memberikan semangat dan motivasi bahwa penulis pasti mampu melewati fase-fase dalam penulisan skripsi ini
3. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
4. Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi
5. Ibu Sany Dwita Dwita, SE, M.Si.Ak, Ph.D dan Bapak Jefriyanto, SE, M.Ak selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang amat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Dr. Nelvirita, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing akademik

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
8. Kepada Bapak Anda Setia Budi, SH yang telah memberikan support kepada penulis dari mulai awal perkuliahan sampai dengan di wisuda
9. Kepada sahabat penulis yang sudah bersama sejak tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Universitas Adillah Azkiyah S.Pd, yang terus memberikan semangat dan kata-kata mutiara agar penulis dapat termotivasi untuk menuntaskan skripsi ini
10. Kepada sahabat penulis yang telah banyak membantu dalam perkuliahan dari awal zaman Covid-19 sampai dengan sidang komprehensif Widya Anas Sholihat
11. Kepada teman penulis Yovie Santria, SE yang rutin membantu dan memberikan jawaban kepada penulis ketika ada permasalahan dalam penulisan tugas akhir skripsi ini
12. Kepada teman penulis Hanna, Ulan, Vira, Arifah dan teman lainnya di Healing Gaskeun yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang terus memberikan semangat dan dukungan agar penulis dapat melalui proses sidang skripsi ini
13. Kepada teman-teman kelas Accounting C 2019 yang telah banyak memberikan bantuan selama proses perkuliahan sampai dengan sidang akhir ini
14. Kepada *member* Bangtan Sonyeondan (Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook) dan member grup Seventeen (S-Coups, Jeonghan, Joshua, Jin, Wonwoo, Hoshi, Woozi, The8, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, Dino) yang terus setia menemani pagi, siang dan malam penulis serta memberikan hiburan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tugas akhir skripsi
16. Terakhir untuk Vivi Anugrah Ilahi, diri ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah mampu melalui fase skripsi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan

apa yang telah di mulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta melalui setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Sekali lagi, terima kasih!

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penulisannya maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya, Aamiin.

“Allahumma yassir wala tu’assir robbi tammim bil khoir”

“You will still grow”

“Jika Allah Telah Menghendaki Keberhasilan, Maka Jutaan Manusia Pun Takkan Bisa Menggagalkannya”

Padang, Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
BAB II.....	20
KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Kajian Teori	20
1. Teori Agensi.....	20
2. <i>Corporate Social Responsibility</i>	23
3. <i>Corporate Governance</i>	27
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Pengembangan Hipotesis.....	42
1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	42
2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	46
3. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	50
D. KERANGKA KONSEPTUAL	55
BAB III	57
METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Populasi Dan Sampel	57
C. Jenis Dan Sumber Data.....	59

D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel.....	60
F. Teknik Analisis Data.....	67
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	67
2. Uji Asumsi Klasik.....	67
3. Uji Hipotesis.....	70
BAB IV.....	73
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI).....	73
B. Analisis Data.....	74
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	74
2. Uji Asumsi Klasik.....	78
3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	82
4. Uji Kelayakan Model.....	85
C. Pembahasan.....	91
1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	92
2. Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	96
3. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	99
BAB V.....	107
PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Keterbatasan.....	109
C. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual	56
---------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kriteria Pemilihan Sampel.....	59
Tabel 4. 2 Analisis Statistik Deskriptif.....	74
Tabel 4. 3 Uji Normalitas.....	78
Tabel 4. 4 Uji Multikolonirietas.....	79
Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi.....	82
Tabel 4. 6 Analisis Regresi Berganda.....	83
Tabel 4. 7 Uji Statistik F	86
Tabel 4. 8 Koefisien Determinasi (R^2).....	87
Tabel 4. 9 Uji Statistik t.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis yang terus mengalami peningkatan juga diiringi dengan semakin banyaknya tuntutan oleh pemangku kepentingan terhadap perusahaan *go public*. Para pemangku kepentingan mulai menyadari dan berkeinginan bahwa perusahaan perlu mengimbangi fokus yang hendak dicapai dalam menggerakkan bisnis. Fokus utamanya tidak hanya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan memperoleh keuntungan maksimal, namun juga perlu dibarengi dengan memperhatikan kondisi di sekitar perusahaan yang meliputi aspek sosial serta lingkungan sebagai dampak dari kegiatan operasinya.

Hal ini senada dengan istilah *the triple bottom line* yang disampaikan oleh John Elkington pada tahun 1997. Elkington berpandangan bahwa jika perusahaan berkeinginan untuk *sustain* maka perlu memperhatikan 3P. Tidak hanya mencari *profit*, perusahaan juga perlu memerhatikan dan terlibat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (*people*), serta ikut berpartisipasi aktif untuk melestarikan lingkungan (*planet*) (Effendi, 2020). Aktivitas perusahaan yang lebih berfokus terhadap sosial kemasyarakatan dan lingkungan tersebut dalam istilah korporasi lebih sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR).

CSR diartikan sebagai sebuah konsep manajemen dimana perusahaan menyatukan aspek kepedulian terhadap sosial dan lingkungan ke dalam

kegiatan operasional perusahaan serta berinteraksi dengan *stakeholder* lainnya (*United Nations Industrial Development Organization* dalam Thuy, *et al.*, 2022). Perusahaan melaksanakan CSR bukan hanya sekedar filantropi atau pemenuhan kewajiban semata. Namun, CSR sudah dianggap sebagai salah satu etika bisnis dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan interaksi yang baik dengan pemangku kepentingan, serta dijadikan sebagai strategi bisnis untuk jangka panjang oleh perusahaan.

Menurut Stawicka (2021), konsep CSR dianggap sebagai komponen konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah penciptaan nilai, pengelolaan lingkungan hidup, sistem produksi ramah lingkungan, dan pengelolaan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam konsep pemangku kepentingan. CSR dan tujuan berkelanjutan berkaitan dan mencerminkan saling ketergantungan dalam proses ekonomi, sosial, dan iklim (Rogall, 2010 dalam Stawicka, 2021). Pelaksanaan CSR adalah salah satu bentuk dukungan dari perusahaan agar tercapainya program *The Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2030 baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Tujuan utama dari program ini antara lain mengurangi kemiskinan, tercapainya kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim (Ishartono dan Raharjo, 2016), sehingga peran dan komitmen dari para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mendorong terlaksananya program tersebut. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, topik CSR telah menarik atensi para

peneliti dan praktisi di seluruh dunia (Qa'dan dan Suwaidan, 2018; Zaid, *et al.*, 2019; Khairunnisa dan Anita, 2021).

Perusahaan yang melangsungkan tanggung jawab sosial cenderung memperoleh loyalitas yang lebih besar dari pelanggan, khususnya produk yang ramah lingkungan (Sihombing, *et al.*, 2020). Selama pandemi Covid-19, perusahaan terus berupaya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dengan berfokus kepada mitigasi penyebaran virus dan pemenuhan kebutuhan sebagai perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Santoso (2022), keyakinan perusahaan untuk melaksanakan CSR di masa pandemi Covid-19 akan memberikan manfaat ekonomi pasca pandemi. Biaya yang dialokasikan untuk CSR memang tidak sedikit, namun jika strategi CSR yang dilakukan perusahaan berjalan lancar, maka dapat berpotensi untuk meningkatkan nilai perusahaan apabila investor menaruh atensi pada kegiatan sosial. Jika perusahaan selalu mendukung karyawan, pelanggan, serta masyarakat selama masa krisis, maka perusahaan dapat meningkatkan reputasi bisnisnya dan memperoleh hubungan timbal balik yang baik diantara kelompok tersebut (Mahmud, *et al.*, 2021).

Di Indonesia, implementasi CSR telah didukung oleh pemerintah pusat dengan dibentuknya sebuah regulasi yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 66 dan 74 dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta wajib menyampaikannya dalam laporan

tahunan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen juga menetapkan aturan hukum yang termuat dalam Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 dengan menyebutkan bahwa Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib untuk menyusun Laporan Keberlanjutan. Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan laporan yang disampaikan kepada masyarakat yang didalamnya termuat mengenai kinerja ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan hidup suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis keberlanjutan (POJK No. 51/POJK.03/2017). Dengan adanya aturan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan dan pengungkapan CSR dalam sebuah laporan merupakan sebuah keharusan yang mesti dilaksanakan oleh entitas bisnis. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah menunjukkan pola pikir untuk memulai dan menjadikan pelaporan keberlanjutan sebagai bentuk keunggulan kompetitif. Adanya pelaporan ini dinilai dapat memberikan peluang untuk meningkatkan citra perusahaan, walaupun dampak dari upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lainnya tidak dapat dilihat secara instan (Kurniawan, *et al.*, 2018).

Berdasarkan pernyataan dari Direktur Keuangan dan SDM PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa terdapat 154 perusahaan yang terdaftar di BEI yang menerbitkan pelaporan keberlanjutan per akhir tahun 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 20% dari jumlah perseroan yang telah mempublikasikan laporan keberlanjutan di tahun 2020 melalui sistem

SPE-IDXNet (majalahcsr.id, 2022). Walaupun demikian, peningkatan yang terjadi pada pelaporan keberlanjutan oleh perusahaan publik tidak sebanding dengan total perusahaan yang telah *listing* di Bursa Efek pada periode 2021 sebanyak 766 perusahaan. Ini membuktikan bahwa masih sedikitnya perusahaan yang menyampaikan laporan keberlanjutan pada publik. Penelitian oleh Rice (2017) juga menyampaikan bahwa pengungkapan CSR oleh perusahaan publik masih dikategorikan rendah di Indonesia, yaitu sekitar 30% dari item-item yang harus diungkapkan. Penelitian oleh Ramadhona dan Prasetiono (2022) juga mengungkapkan kesimpulan yang sama bahwa rata-rata pengungkapan CSR oleh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia hanya berkisar sebesar 30,5%. Penyebab rendahnya CSR disebabkan karena minimnya regulasi yang berfokus pada penekanan item-item wajib yang diungkapkan (Rice, 2017). Selain itu, belum adanya peraturan khusus terkait pengungkapan CSR minimum dan sanksi hukum yang diberikan jika perusahaan tidak menerapkan CSR (Ebaid, 2022).

Pelaksanaan dan pelaporan CSR yang belum maksimal dapat dilihat dari bagaimana perusahaan mengimplementasikan mekanisme tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* (selanjutnya disebut CG). Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), CG merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, karyawan, pihak kreditor, serta para pemangku internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-

hak dan kewajiban mereka atau dengan makna lain sebuah sistem yang mengendalikan perusahaan (Effendi, 2020). Konsep CG yang baik lebih menekankan pada pentingnya perusahaan dikelola secara transparan, adil, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* (Ginting, 2016). Penerapan sistem CG oleh perusahaan dapat memberikan dampak positif, diantaranya: meningkatnya kepercayaan pemegang saham kepada pengelola perusahaan, terkhususnya dalam pelaporan informasi perusahaan (baik keuangan maupun non-keuangan), penetapan kebijakan yang dapat melindungi kepentingan seluruh *stakeholders*, terjaganya komunikasi yang efektif di antara organ-organ perusahaan, serta meningkatkan nilai perusahaan di mata seluruh *stakeholder*.

Terdapat tiga dugaan yang ditemukan terkait sifat dan hubungan antara CG dan CSR oleh penelitian Zaman, *et al.* (2020). Pertama, CG adalah pilar CSR, mengacu pada gagasan bahwa CSR yang efektif memerlukan CG yang solid. Kedua, CSR sebagai salah satu dimensi CG, yang menekankan fungsi mitigasi risiko non-keuangan CG. Ketiga, CG dan CSR adalah satu kontinum yang sama dengan gagasan bahwa kinerja perusahaan (termasuk CSR) dan kesesuaian terhadap etika bisnis (CG) berjalan beriringan (Zaman, *et al.*, 2020). Bhimani dan Soonawalla serta Jamali, *et al.* (dalam Thuy, *et al.*, 2022) mengungkapkan bahwa CSR dan CG adalah dua sisi mata uang yang sama dimana keduanya mengharuskan perusahaan untuk melaporkan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada

seluruh pemangku kepentingan. CSR dan CG memiliki kaitan yang sangat kuat, dimana implementasi CSR merupakan wujud dari penerapan prinsip-prinsip CG oleh perusahaan. Prinsip tersebut antara lain *responsibility* dan *transparency*. Prinsip *responsibility* berkaitan dengan pertanggungjawaban perusahaan dalam menjalankan aktivitas sosial kemasyarakatan dan peduli terhadap lingkungan. Sedangkan prinsip *transparency* berkaitan dengan keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan informasi mengenai CSR.

Corporate governance termasuk dalam faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR (Zaid, *et al.*, 2019; Ullah, *et al.*, 2019; Thuy, *et al.*, 2022; Edinov, *et al.*, 2022). Indikator *corporate governance* yang digunakan pada penelitian ini adalah karakteristik dewan komisaris, karakteristik komite audit, dan struktur kepemilikan. Menurut Gibbins, *et al.*; Hanifa dan Cooke (dalam Khan *et al.*, 2013), pengungkapan CSR dipengaruhi oleh motif dan nilai dari mereka yang terlibat dalam membuat dan mengambil keputusan dalam organisasi, pertimbangan mekanisme tata kelola perusahaan, khususnya struktur kepemilikan dan komposisi dewan bisa menjadi penentu penting. Selain itu, mekanisme pengawasan seperti komite audit juga diperlukan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial (Mohammadi, *et al.*, 2021).

Salah satu organ perusahaan yang berperan penting untuk mengawasi jalannya perusahaan dan memastikan bahwa *corporate governance* diterapkan dengan baik oleh perusahaan adalah dewan komisaris. Ukuran

dewan berpengaruh cukup besar terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan, termasuk pengungkapan CSR (Qa'dan dan Suwaidan, 2018). Ahmed Haji (dalam Zaid, *et al.*, 2019) menyebutkan dewan yang lebih besar mempunyai keragaman latar belakang, pengetahuan dan gender yang lebih besar yang berguna bagi perusahaan untuk mendapatkan ide berbeda mengenai keterlibatan dalam kegiatan sosial. Sebaliknya, jumlah dewan komisaris yang sedikit dapat mengakibatkan semakin sulit untuk mengawasi dan mengendalikan CEO, sehingga dirasa kurang efektif (Sukasih dan Sugiyanto, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Zaid, *et al.* (2019) menunjukkan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Lain halnya dengan penelitian oleh Thuy, *et al.* (2022) menyimpulkan bahwa ukuran dewan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Komisaris independen merupakan anggota dewan yang tidak terafiliasi dengan dewan komisaris, direksi dan pemegang saham pengendali, serta terbebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang bisa mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak mandiri dan semata-mata bertindak hanya untuk kepentingan perseroan (Asiah dan Muniruddin, 2018). Independensi dewan yang lebih tinggi mempunyai dampak yang lebih besar dalam hal pengawasan dan pengendalian jika dipandang dari teori agensi, sehingga diharapkan akan lebih berhasil dalam memberikan panduan yang jelas untuk membantu manajer bergerak ke arah aktivitas yang meningkatkan nilai perusahaan dan transparansi jangka panjang

(Mohammadi, *et al.*, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Habbash (2016) menyatakan bahwa pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif oleh dewan komisaris independen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Asiah dan Muniruddin (2018) menunjukkan hasil sebaliknya yaitu komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Frekuensi rapat dewan komisaris merupakan total keseluruhan pertemuan yang dilakukan oleh dewan komisaris selama satu tahun. Dalam Laksana (2008) berpendapat bahwa rapat yang dilakukan rutin akan memfasilitasi pembagian informasi di antara dewan dan meningkatkan pengambilan keputusan yang efektif. Dewan yang jarang ikut rapat biasanya akan mengalami masalah komunikasi terkait kebijakan industri, salah satunya kebijakan untuk mengungkapkan CSR (Hasanah, *et al.*, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Sektiyani dan Ghozali (2019) menyimpulkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah, *et al.* (2019) menyatakan bahwa rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Dewan komisaris dapat membentuk sebuah komite untuk membantunya dalam menjalankan tugas sebagai pengawas yang dinamakan dengan komite audit. Dalam peraturan OJK No 55/POJK.04/2015 disebutkan bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota, yang terdiri dari ketua komite audit

sekaligus merangkap sebagai komisaris independen, dan dua anggota komite audit lainnya adalah pihak yang berasal dari eksternal perusahaan. Bedard, *et al.* (dalam Appuhami dan Tashakor, 2017) menyatakan bahwa komite audit dengan ukuran yang besar mempunyai kekuatan, keragaman, keahlian dan pandangan yang dibutuhkan untuk memastikan pemantauan yang tepat yang mengarah pada pengungkapan CSR. Komite audit dengan jumlah komisaris independen yang lebih tinggi mampu meningkatkan pengendalian internal dan mengurangi *agency cost* sehingga akan menghasilkan pengungkapan yang lebih berkualitas (Forker, 1992 dalam Said, *et al.*, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammadi, *et al.* (2021), Appuhami dan Tashakor (2017), dan Buallay dan Al-Ajmi (2020) mengungkapkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya, penelitian oleh Iga dan Zulaikha (2023) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Karakteristik lain dari komite audit adalah frekuensi rapat komite audit. Komite audit mengadakan rapat guna membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pelaporan perusahaan, efektivitas pengendalian internal serta penerapan tata kelola perusahaan. Komite audit yang rutin mengadakan rapat akan sering memberikan rekomendasi kepada manajemen perusahaan, termasuk dalam hal pelaporan CSR. Menurut Appuhami dan Tashakor (2017) dan Azzahra, *et al.* (2021) mengatakan

bahwa rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Haribowo (2015) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Proksi yang digunakan pada variabel struktur kepemilikan antara lain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berada dalam perusahaan (direksi, manajer, maupun dewan komisaris). Semakin besar kepemilikan manajerial dapat membuat semakin terikatnya kekayaan manajemen dengan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen dapat berupaya untuk mengurangi resiko kehilangan kekayaannya (Karima, 2014). Manajer akan memaksimalkan nilai perusahaan yang nantinya akan berdampak kepada kesejahteraan manajer sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Listyaningsih, *et al.* (2018) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afdila dan Zulvia (2022) dan Ullah, *et al.* (2019) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Proksi selanjutnya yaitu kepemilikan institusional yang berarti kepemilikan oleh pihak yang berbentuk lembaga seperti perseroan terbatas, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, yayasan, bank, dana pensiun dan lembaga lainnya. Tingginya kepemilikan institusional akan menghasilkan upaya monitoring yang lebih besar oleh pemegang saham

institusi sehingga dapat menghalangi terjadinya tindakan opportunistik manajer (Nurleni, *et al.*, 2018). Sebagian investor institusi akan memperhatikan kinerja jangka panjang dengan meningkatkan praktik manajemen yang baik seperti tindakan CSR (Qa'dan dan Suwaidan, 2018). Nugroho dan Yulianto (2015) serta Afdila dan Zulvia (2022) meneliti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian oleh Sukasih dan Sugiyanto (2017) berkesimpulan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Machmud dan Djakman (dalam Nugroho dan Yulianto, 2015) mengungkapkan bahwa kepemilikan asing dalam perusahaan adalah pihak yang dianggap *concern* dalam pengungkapan CSR, terkhususnya negara-negara Eropa dan *United States* yang sering memperhatikan isu-isu sosial. Kepemilikan saham asing dalam jumlah besar biasanya akan menimbulkan banyak asimetri informasi. Sebab, adanya hambatan dalam penggunaan bahasa, lokasi dan letak geografis yang berbeda sehingga perusahaan dapat terdorong untuk mengungkapkan informasi lebih luas (Afdila dan Zulvia, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Listyaningsih, *et al.* (2018) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Qa'dan dan Suwaidan (2018) menemukan bahwa kepemilikan asing dengan pengungkapan CSR tidak ditemukan hubungan yang signifikan.

Kepemilikan saham publik adalah kumpulan dari keseluruhan saham yang dimiliki oleh masyarakat secara luas di luar manajerial, pemerintah, institusional, maupun asing (Edinov, *et al.*, 2022). Tingginya proporsi saham oleh publik menandakan bahwa pengawasan dan tekanan yang diberikan kepada manajemen juga akan meningkat. Dengan demikian, manajemen perusahaan tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang dan menyampaikan informasi seluas-luasnya. Penelitian oleh Rahayu dan Anisyukurlillah (2015) berkesimpulan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian oleh Edinov, *et al.* (2022) menyimpulkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Teori keagenan adalah salah satu teori yang paling sering digunakan untuk meneliti mengenai *corporate governance*. Berdasarkan sudut pandang teori agensi dijelaskan bahwa hubungan keagenan timbul antara dua pihak, dimana ketika seorang agen yang ditunjuk oleh prinsipal untuk melakukan tindakan atas namanya (Zaid, *et al.*, 2019). Pemisahan antara kepemilikan dan kepengurusan perusahaan dapat berpotensi menimbulkan yang namanya *agency conflict*. Oleh karena itu, mekanisme *corporate governance* ditetapkan untuk dapat mengurangi *agency conflict* antara dua kelompok (manajer dan pemegang saham) tersebut (Zaid, *et al.*, 2019). Para ahli teori keagenan berpendapat bahwa mekanisme CG perlu dirancang untuk memastikan bahwa penerapan kegiatan CSR dapat

menimbulkan manfaat efisiensi (McWilliam dan Siegel dalam Jain dan Jamali, 2015).

Masih terdapatnya ketidakkonsistenan hasil penelitian pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR membuat penelitian ini masih menarik untuk diteliti. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Zaid, *et al.* (2019) dengan judul “*The effect of corporate governance practices on corporate social responsibility disclosure evidence from Palestine.*” Penelitian ini menggunakan karakteristik dewan komisaris (ukuran dewan, dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris). Alasan pemilihan variabel tersebut karena dewan komisaris selaku pihak yang mewakili pemegang saham perlu memastikan bahwa perusahaan mengambil setiap keputusan yang mengarah pada pemenuhan seluruh kepentingan *stakeholder*-nya. Dewan komisaris dapat memberikan rekomendasi, saran serta opini pada perusahaan dalam hal pelaksanaan dan pengungkapan CSR, sehingga laporan yang dibuat oleh perusahaan dapat semakin berkualitas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel yang digunakan. Penelitian ini menambahkan karakteristik komite audit (dengan proksi ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit) (Azzahra, *et al.*, 2021; Buallay dan Al-Ajmi, 2020) dan variabel struktur kepemilikan (dengan proksi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan kepemilikan

publik). Alasan pemilihan variabel komite audit karena komite ini bertugas dan bertanggungjawab membantu dewan komisaris untuk mengawasi setiap proses pelaporan perseroan, baik pelaporan informasi keuangan maupun non-keuangan (termasuk informasi CSR), serta memastikan bahwa perseroan telah menerapkan tata kelola dengan baik. Dengan adanya tugas tersebut, diharapkan dapat mendorong keterbukaan manajemen untuk menyampaikan laporan mengenai kondisi terkini perseroan secara lebih luas lagi kepada seluruh *stakeholders*.

Sedangkan alasan pemilihan variabel struktur kepemilikan karena fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan yang ditentukan oleh manajemen perusahaan juga berasal dari pihak eksternal perusahaan selaku pemilik. Peran aktif dari pihak eksternal diharapkan dapat mengimbangi kepentingan antara pemilik dengan pengelola perusahaan dan memberikan pengaruh atas kegiatan operasional perusahaan, termasuk dalam memaksimalkan kinerja perusahaan. Salah satu caranya adalah melaksanakan kegiatan sosial dan lingkungan untuk mendapatkan legitimasi *stakeholders*.

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan data perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mengingat dari tahun ke tahun, perusahaan sektor ini amat mendominasi terjadinya masalah-masalah yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat yang dapat merugikan berbagai pihak. Salah satu fenomenanya terjadi pada PT. Medco E&P Malaka yang merupakan

anak perusahaan dari PT. Medco Energi Internasional. Perusahaan dianggap belum mampu memberikan solusi dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasionalnya. Dikutip dari kumparan.com (2023), terhitung sudah sekitar 13 orang yang sudah menjadi korban sejak 2019 sampai dengan 2022 dan rata-rata didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Kasus lainnya adalah pada PT. Adaro Energy di tahun 2018. Perusahaan sudah menganggarkan dana sebanyak Rp40 Milyar terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan dana sebanyak itu, perusahaan seharusnya mampu mengembangkan daerah di sekitar aktivitas pertambangan. Namun, dalam kenyataannya terlihat bahwa jalan-jalan umum yang berada di sekitar area pertambangan tidak diterangi oleh lampu jalan meskipun tiang listrik sudah di pasang berjejeran (dpr.go.id, 2018).

Dilansir dari studi Giljum, *et al.* (2022) yang meneliti dampak deforestasi pada 26 negara yang terletak di hutan tropis basah dan kering akibat dari operasi industri pertambangan. Dari keseluruhan negara yang diteliti, Indonesia adalah negara yang paling terkena dampak dari deforestasi langsung. Sekitar 58,2% hilangnya hutan akibat adanya ekspansi tambang di wilayah Kalimantan Timur untuk produksi batubara. Peningkatan aktivitas produksi dan operasional dari sektor pertambangan setiap tahunnya dapat menyebabkan penggunaan sumber daya yang berlebihan dan menimbulkan lebih banyak lagi dampak negatif. Oleh karena itu, perusahaan berkewajiban untuk meningkatkan aktivitas CSR

dan melaporkannya secara berkala agar komunikasi yang baik antara perusahaan dengan *stakeholders* dapat terjaga. Periode pengamatan yang dipilih pada penelitian ini adalah selama tiga tahun dari tahun 2020 hingga 2022, dengan pertimbangan bahwa tahun tersebut mencerminkan kondisi terbaru perusahaan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian sebagai berikut **“Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2020-2022).”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah karakteristik dewan komisaris yang diproksikan melalui ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
2. Apakah karakteristik komite audit yang diproksikan melalui ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
3. Apakah struktur kepemilikan yang diproksikan melalui kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris yang diproksikan melalui ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik komite audit yang diproksikan melalui ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur kepemilikan yang diproksikan melalui kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi terutama akuntansi serta berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi referensi dan literatur untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan kepada peneliti mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan serta gambaran oleh perusahaan untuk melihat pengaruh *corporate governance* dengan berbagai indikatornya. Sehingga perusahaan dapat mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi kegiatan pengungkapan CSR dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dijadikan intropeksi bagi perusahaan terkait dalam aktivitas perusahaan guna untuk kebaikan bersama dan menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder*.